

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agustino Leo (Dasar-Dasar Kebijakan Publik) Alfabeta Bandung 2008 .
- Abdul Wahab, Solichin Analisis Kebijakan Publik : dari Formulasi Ke
Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik. PT. Bumi
Aksara :Jakarta 2012.
- Arifin.(Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
Bandung 2015.
- Abdul Gaffar Karim (ed.), Kompleksitas Persoalan Otonomi di
Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Relajar. 2003.
- Amrah Muslimin. Aspek-Aspek Hukum Pemerintahan Daerah, Alumni,
Bandung, 1986,
- Bagir Manan, (Menyongsong Fajar Otonomi Daerah), *Pusat Studi Hukum
UII*, Yogyakarta, 2005.
- Bhenyamin Hoessain. Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah:
Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi. Departemen Ilmu
Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Indonesia, Jakarta, 2009
- Irwan Sudjito.(Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah), Rieneka Cipta,
Jakarta, 1990
- Laica Marzuki. (Berjalan-jalan Di Ranah Hukum). Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Marihot Pahala Siahaan, Hukum Bangunan Gedung Di Indonesia, PT.Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ni'matul Huda, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan
Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Ni'matul Huda,Problematika Pembatalan Peraturan Daerah.UII Press.
Yogyakarta, 2010.

Sarundajang, (Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

S. Grindle Public Policy :(Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan). Penerbit renada Media : Jakarta 2005.

Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, Penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Rajawali Press, Jakarta, 2001.

Soejono Sukanto, Soziologi Suatu Pengantar, Rajawali pers, 2002.

Suharto (Analisis Kebijakan Publik) Bandung 2012.

The Liang Gie. (Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia), Gunung Agung, Jakarta, 1967.

Thomas. (Kebijakan Publik) Jakarta pers 2000.

B. UNDANG UNDANG

Kitab Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Ketertiban Umum

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Izin Pengelolaan Dan
Pengusahaan Sarang Burung Walet

Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan penertiban
penangkaran burung walet yang ada di kabupaten Rokan Hilir.

C. SUMBER LAIN

<https://www.goriau.com/berita/baca/timbulkan-suara-cit-cit-wabup-rohil-tegur-pemilik-ruko-penangkaran-walet.html>, diakses tanggal 17 juli 2020.

<https://www.suarabirokrasi.com/2018/08/08/pemda-rohil-minta-penangkar-burung-walet-ikuti-aturan-ini/>, diakses tanggal 31 juli 2020.

<https://duniawalet.co.id/solusi-cerdas-di-tengah-terpuruknya-harga-sarang-walet/16>, diakses tanggal 31 Juli 2020.

<https://trikmerawat.com/budidaya-walet/>, diakses tanggal 30 juli 2020.